

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Arief Nurhandika¹⁾

Universitas Kuningan
Arief.nurhandika@uniku.ac.id

Faishal Rahimi²⁾

Universitas Kuningan
faishalrahimi@uniku.ac.id

Abstract

Purpose of this study is to examine: the effect of slack resource, komposisi komisaris, managerial ownership, foreign ownership, Audit Committee, and size of the public accounting firm on the quality of social responsibility disclosure. The statistical method used is multiple regression analysis. The results showed that 1) slack resource has an effect on the quality of responsibility disclosure, 2) the composition of the board of commissioners has no effect on the quality of responsibility disclosure. 3) managerial ownership no haseffect on the quality of responsibility disclosure. 4) foreign ownership has no effect on the quality of responsibility disclosure. 5) The Audit Committee has noeffect on the quality of responsibility disclosure. 6) the size of the public accounting firm affects the quality of responsibility disclosure

Keywords: *slack resource, board of commissioners composition, managerial ownership, foreign ownership, Audit Committee, size of public accounting firm, corporate social responsibility*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: pengaruh sumber daya lemah, komposisi komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komite audit, dan ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) *slack resource* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab, 2) komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab. 3) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab. 4) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab. 5) Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab. 6) Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab

Kata kunci: *slack resource*, komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komite audit, ukuran kantor akuntan publik, tanggung jawab sosial perusahaan

A. Pendahuluan

Pada era saat ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan performa kinerja agar selalu tampil sebagai perusahaan yang baik dari segi finansial maupun sosial. Tujuan perusahaan pada era saat ini adalah memberikan citra yang baik untuk kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang salah satunya adalah memberikan fokus kepada isu-isu sosial dan lingkungan yang berbentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Roberts (1992) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan yang memiliki fokus terhadap kegiatan sosial yang bertujuan sebagai penunjang kinerja pada perusahaan tersebut. Isu-isu sosial dan lingkungan saat ini menjadi strategi unggulan yang menarik bagi perusahaan bertujuan untuk investasi jangka panjang. Survey secara online yang dilakukan Nielsen (2014) memberikan hasil bahwa dari 3000 responden konsumen dari berbagai negara yang diambil sebagai sampel, 55% konsumen memberikan pilihannya terhadap produk-produk perusahaan yang memiliki fokus lebih kepada isu kepedulian sosial dan lingkungan.

Perkembangan ini mendorong konsumen untuk memilih perusahaan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi sehingga dibutuhkan wadah informasi yang valid salah satunya dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk pelaporan. Pelaporan tersebut menggambarkan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkomitmen terhadap kepedulian sosial dan lingkungan dari dampak kegiatannya, menurut Laksmi dan Kamila (2018) terdapat tiga dimensi merefleksikan dampak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi masyarakat atau lingkungan. Tujuan dari dibentuknya pelaporan menurut Anggraini dan Djakman (2017) adalah agar para pemangku kepentingan dapat mendapatkan informasi yang validasinya tinggi dan relevan serta agar menjalin komunikasi baik di luar maupun di dalam perusahaan. Menurut Gray et al., (2001) adapun Bentuk dan isi pada informasi dalam pelaporan tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, kritik dan saran yang memiliki kaitan dengan fokus lingkungan, warga disekitar lingkungan perusahaan, karyawan, layanan untuk konsumen dan mekanisme tatakelola perusahaan tersebut.

Pemerintah Indonesia sebagai pemangku regulasi berharap perusahaan publik di wilayah Indonesia agar fokus terhadap isu-isu sosial dan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama secara kelanjutan dengan menjalankan aturan yang ada. Sehingga pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2012 mengeluarkan surat edaran ketua Bapepam-LK No. Kep-431/BL/2012 tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di Indonesia. selain regulasi tersebut, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan paragraf 9 (sembilan) yang secara tidak langsung memberikan gambaran tentang pengungkapan tanggung jawab perusahaan dengan fokus permasalahannya lingkungan dan sosial dalam laporan tambahan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah.

Faktanya penerapan peraturan yang ada saat ini masih terdapat kekurangan tentang bentuk dan tata cara penyajian dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, serta perusahaan yang ada di Indonesia masih menganggap tanggung jawab sosial sebagai hal

yang dikeluarkan secara sukarela, hal ini mengakibatkan kualitas penilaian yang cukup rendah bagi perusahaan Indonesia mengenai kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Fakta tersebut diungkapkan oleh Supriyono dan Suhardjanto (2013) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial yang diungkapkan secara relevan dan informatif di beberapa negara ASEAN salah satunya Indonesia memperoleh nilai 40,14 lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia memperoleh nilai 58,52 dan 54,12. Serta diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh *National University Of Singapore* (NUS) di publikasi pada *Conference on Corporate Governance and Responsibility: Theory Meets Practice* memaparkan bahwa perusahaan publik yang berada pada kawasan ASEAN memiliki penilaian yang cukup rendah dalam segi mengungkapkan kualitas tanggung jawab sosialnya, hal tersebut disebabkan perusahaan publik yang ada masih belum memahami praktik tanggung jawab sosial, dan penilaian Indonesia cukup rendah dengan Malaysia yaitu 48,8 dan 47,7 (Suastha, 2016)

Fakta tersebut memberikan penjelasan bahwa perusahaan di Indonesia saat ini masih memberikan informasi yang kurang relevan dan berkualitas dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Menurut Anggraini dan Djakman (2017) regulasi yang ada di Indonesia masih belum mewajibkan kepada perusahaan publik yang beroperasi di Indonesia untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan publik yang ada masih menggunakan berbagai macam bentuk dan struktur dalam memberikan informasi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Fenomena diatas mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan publik yang beroperasi di Indonesia masih sangat rendah akan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan berdampak pada kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dikeluarkan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial berkualitas dibutuhkan adanya peraturan yang tegas baik secara finansial atau secara narasi sebagai penunjang informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan. Fatima et al., (2015) menyatakan harus ada regulasi yang diperbaiki oleh pemerintah selaku pemangku regulasi karena masih rendahnya kualitas perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya secara utuh dan informatif, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada subjektifitas pandangan perusahaan saja.

Pengaruh terbesar dalam aktifitas mengungkapkan tanggung jawab sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, karena sumber daya adalah salah satu dari instrumen yang dibutuhkan untuk terlaksananya aktifitas ini, menurut Anggreani dan Djakman (2017) untuk mendorong perusahaan dalam mengungkapkan pelaporan tanggung jawab sosial dibutuhkan sumber daya yang memadai agar terlaksana aktifitas perusahaan. Oleh sebab itu, variabel kelonggaran sumber daya tepat dalam pengungkapan tanggung jawab sosial karena kelonggaran sumber daya merupakan salah satu kelebihan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki manfaat positif bagi aktifitas perusahaan salah satunya adalah mengungkapkan tanggung jawab sosial yang berkualitas. Menurut Bourgeois (1981) kelonggaran sumber daya adalah sumber daya lebih yang bermanfaat untuk beradaptasi dalam perubahan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam maupun diluar perusahaan dan perusahaan memperolehnya secara potensial. Menurut Harrison dan Coombs (2012) diharapkan dengan adanya kelonggaran sumberdaya yang ada, perusahaan mampu menggunakannya untuk berinvestasi pada kegiatan sosial dan berdampak pada citra perusahaan dimasa akan datang.

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial adalah konsekuensi logika dari penerapan konsep mekanisme tata kelola perusahaan, yang pada prinsipnya seperti menyatakan bahwa perusahaan wajib memberi perhatian terhadap kepentingan *stakeholder* yang sesuai aturan berlaku sehingga terjalin kerjasama yang efektif demi keberlangsungan

perusahaan (Utama, 2007). Tata cara mengimplementasikan penata kelolaan perusahaan membutuhkan komitmen dari semua komponen organisasi dan dimulai pertama kali dari menetapkan kebijakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh para petinggi manajemen serta menerapkan kode etik yang wajib dipatuhi pula oleh semua jajaran organisasi karena perusahaan dengan mekanisme tata kelola perusahaan benar dan baik berdampak pula terhadap aktifitasnya yang positif salah satunya adalah fokus terhadap isu sosial yang ada. Anggraeni dan Djakman (2017) menyatakan perusahaan dengan penata kelolaan yang benar dan baik merupakan cerminan dari perusahaan yang memperdulikan isu-isu sosial maupun lingkungan..

Menerapkan tata kelola perusahaan secara benar memberikan dorongan kepada manajemen untuk memperhatikan secara penuh agar terlaksananya aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan (Laksmi dan Kamila, 2018). Adapun tujuan penerapan dari mekanisme tata kelola perusahaan secara benar dan baik pada perusahaan agar mendapatkan terlaksana dengan baik (Nurhandika dan Hamzah, 2019; Terzaghi, 2012). Hal itu mempertegas bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan mempertanggung jawabkannya kepada para pemangku kepentingan (Anita et al., 2017). Komponen Mekanisme tata kelola perusahaan pada penelitian ini antara lain dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komite audit, dan ukuran kantor akuntan publik.

Penelitian ini menambahkan variabel ukuran kantor akuntan publik Ramadhan (2017), serta akan dilihat pengaruhnya terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena jika kita melihat keterkaitan antar variabel independen antara kelonggran sumber daya, mekanisme tata kelola perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik ketiganya saling berkaitan akan terpengaruhnya terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu hanya menggunakan tiga tahun amatan Anggraeni dan Djakman (2017) dan Cahyaningsih dan Martina, (2011), dalam penelitian ini menambah jumlah sampel perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial selama periode 5 tahun amatan dengan tujuan agar dapat menggeneralisasi hasil penelitian. Pada variabel ukuran KAP penelitian terdahulu pengukuran yang mengacu pada penelitian (Juhmani, 2014; Uwuigbe dan Egbide dan 2012; Uyar et al., 2013) menggunakan skala skor 0 dan 1 dengan membedakan *non-big four* dan *big four*, akantetapi berbeda pada penelitian ini adalah pengukurannya menggunakan skor 0-4 karena mengikuti pengklasifikasian kategori ukuran KAP menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan penjelasan Skor 0, jika KAP tersebut berukuran kecil dan dengan rekan perorangan, Skor 1, jika KAP tersebut berukuran menengah dan memiliki rekan 2-5 orang, Skor 2, jika KAP tersebut berukuran besar dan memiliki rekan 6-10 orang, Skor 3, jika KAP tersebut berukuran sangat besar dan memiliki rekan > 10 orang namun bukan termasuk KAP *big four*, Skor 4, jika KAP tersebut memiliki kerja sama dengan Organisasi Akuntan Asing (OAA) yang termasuk dalam *big four*. Pengklasifikasian tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kategorisasi ukuran KAP di Indonesia.

Pada penelitian ini menggunakan variabel kontrol antara lain Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas karena dari penelitian terdahulu (Anggraini dan Djakman, 2017; Chintrakarn et al, 2016; Laksmi dan Kamila, 2018) variabel ini juga digunakan sebagai variabel kontrol dan secara konsisten berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

B. Metode Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 hingga 2017. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017. Dasar dari pemilihan sektor ini adalah perusahaan dengan industri yang sejenis memiliki karakteristik yang sama.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang mumpuni dalam kebutuhan penelitian, kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017
2. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajerial periode 2013 - 2017
3. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing periode 2013 - 2017
4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2013 - 2017
5. Perusahaan yang mengeluarkan laporan tanggung jawab sosial periode 2013 – 2017

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data yang didapat pada penelitian ini bersifat sekunder dan dapat diperoleh dalam laporan tahunan, dan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) tahun 2013 sampai dengan 2017 dan Situs resmi pada setiap perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi data penelitian mengenai distribusi dan perilaku data yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan melalui penelitian (Suliyanto, 2011). Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan, terdapat 175 data penelitian. Berikut ini adalah data statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
Kelonggaran Sumber Daya	175	21,09	30,28	25,83	1,86
Komposisi Dewan Komisaris	175	0,20	0,80	0,37	0,09
Kepemilikan Manajerial	175	0,00	0,68	0,03	0,07
Kepemilikan Asing	175	0,00	0,93	0,43	0,26
Komite Audit	175	2,00	15,00	5,44	2,86
Ukuran Kantor Akuntan Publik	175	2,00	5,00	4,36	0,72
Ukuran Perusahaan	175	19,53	32,15	28,32	1,66
Profitabilitas	175	-0,23	0,54	0,07	0,11
Leverage	175	-7,72	6,17	0,87	1,07
Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	175	0,02	0,26	0,12	0,06

Tabel di atas menjelaskan bahwa variabel kualitas tanggung jawab sosial memiliki nilai tertinggi 0,26 yang diperoleh dari 70 item diungkapkan dibagi dengan jumlah maksimum keseluruhan item pengungkapan. Jumlah item tanggung jawab sosial dengan nilai minimum adalah 0,02 yang diperoleh dari jumlah item yang diungkapkan yaitu 6 item dibagi dengan dengan jumlah maksimum keseluruhan item pengungkapan, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan paling sedikit dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Nilai rata-rata kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial 0,12 hal ini berarti mayoritas perusahaan manufaktur hanya mengungkapkan sekitar 30 item pengungkapan, yang menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur mencapai nilai kurang dari 1, sehingga dapat dinilai bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur belum terlaksana dengan baik dan relatif rendah. Nilai standar deviasi kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki nilai 0,06 hal ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya item yang diungkapkan yang menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan Rata-rata pada kisaran 33 hingga 38 item sehingga data tersebut tidak begitu bervariasi atau bersifat homogen dan sebaran data tidak terlalu luas karena nilai standar deviasi kualitas tanggung jawab sosial perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata kualitas tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel kelonggaran sumber daya memiliki nilai minimum sebesar 21,09 yang berasal dari nilai *logaritma natural* kas setara kas. Artinya perusahaan tersebut memiliki kelonggaran sumber daya yang rendah. Nilai maksimum sebesar 30,28 yang berasal dari nilai *logaritma natural* kas setara kas. Artinya perusahaan tersebut memiliki kelonggaran sumber daya yang tinggi. serta nilai rata-rata dari *logaritma natural* kas setara kas adalah 25,8347, sedangkan untuk nilai standar deviasi dari variabel tersebut adalah 1,86948. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Djakman (2017) memperoleh nilai rata – rata sebesar 14,45 dan nilai standar deviasi sebesar 1,37. Sedangkan nilai minimum pada penelitian tersebut memperoleh 10,92 dan nilai maksimal sebesar 16,92.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel komposisi dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 0,20 dan nilai maksimum sebesar 0,60. nilai rata-rata 0,3761 sedangkan untuk nilai standar deviasi dari variabel tersebut adalah 0,09064. Hal tersebut dapat menampilkan bahwa setiap perusahaan manufaktur rata-rata sudah memiliki anggota dewan komisaris independen diatas 30% dari peraturan yang sudah berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Tommy et al., (2015) memperoleh nilai rata – rata sebesar 5,11 dan nilai standar deviasi sebesar 2,42. Sedangkan nilai minimum pada penelitian tersebut memperoleh 2,00 dan nilai maksimal sebesar 13,00.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,68 serta nilai rata-rata 0,0386 sedangkan untuk nilai standar deviasi dari variabel tersebut adalah 0,07488. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya kepemilikan saham pada tingkat manajer masih sangat rendah, dapat diartikan bahwa pengendalian yang dilakukan oleh setiap tingkat manajer masih sangat kecil atau manajer masih belum memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Elvina et al., (2016) memperoleh nilai rata – rata sebesar 13,53 dan nilai standar deviasi sebesar 21,43. Sedangkan nilai minimum pada penelitian tersebut memperoleh 0.10 dan nilai maksimal sebesar 83,276.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,93 serta nilai rata-rata 0,4314 sedangkan untuk nilai standar deviasi dari variabel tersebut adalah 0,26314. hal ini

menunjukkan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia sangat tinggi, artinya pada pihak luar diharapkan mampu memberikan pengaruh positif pada pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suaryana (2015) memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,4946 dan nilai standar deviasi sebesar 0,25874. Sedangkan nilai minimum pada penelitian tersebut memperoleh 0,12 dan nilai maksimal sebesar 0,90.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 15, serta nilai rata-rata 5,4400 sedangkan untuk nilai standar deviasi dari variabel tersebut adalah 2,86389. Hal tersebut memberikan hasil bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada masih belum mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh otoritas yang berwenang. Penelitian yang dilakukan oleh Tommy et al., (2015) memperoleh nilai rata – rata sebesar 3,40 dan nilai standar deviasi sebesar 0,84. Sedangkan nilai minimum pada penelitian tersebut memperoleh 3,00 dan nilai maksimal sebesar 6,00.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel ukuran kantor akuntan publik memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 5, serta nilai rata-rata 4,3600 sedangkan untuk nilai standar deviasi dari variabel tersebut adalah 0,72047. hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang besar memiliki kecenderungan kepada ukuran kantor akuntan publik yang besar namun tidak berafiliasi kepada *big four*. Penelitian yang dilakukan oleh Juhmani (2014) memperoleh nilai rata – rata sebesar 0,7879 dan nilai standar deviasi sebesar 0,415. Sedangkan nilai minimum pada penelitian tersebut memperoleh 0 dan nilai maksimal sebesar 1.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 19,53 dan nilai maksimum sebesar 32,15 serta nilai rata-rata 28,3231 sedangkan untuk nilai standar deviasi dari variabel tersebut adalah 1,66116. Penelitian yang dilakukan oleh Dermawan dan Deitiana (2010) memperoleh nilai rata – rata sebesar 12,7187 dan nilai standar deviasi sebesar 0,6701. Sedangkan nilai minimum pada penelitian tersebut memperoleh 11,3002 dan nilai maksimal sebesar 13,8108.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel kontrol profitabilitas pada tabel 4 memiliki nilai minimum sebesar -0,23, nilai maksimum sebesar 0,54 serta nilai rata-rata 0,0740 sedangkan untuk nilai standar deviasi dari variabel tersebut adalah 0,11485. hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang ada pada penelitian ini masih rendah nilai profitabilitasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Wulanditya (2018) memperoleh nilai rata – rata sebesar 0,04 dan nilai standar deviasi sebesar 0,09. Sedangkan nilai minimum pada penelitian tersebut memperoleh -0,34 dan nilai maksimal sebesar 0,65.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel kontrol leverage memiliki nilai minimum sebesar -7,72, nilai maksimum sebesar 6,17 serta nilai rata-rata 0,8745 sedangkan untuk nilai standar deviasi dari variabel tersebut adalah 1,07569. Variabel *Leverage* penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Wulanditya (2018) memperoleh nilai rata – rata sebesar 1,21 dan nilai standar deviasi sebesar 1,78. Sedangkan nilai minimum pada penelitian tersebut memperoleh -8,33 dan nilai maksimal sebesar 14,38.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5%. Data dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi variabel dependen lebih dari 5% atau nilai *asympt significance (2-tailed)* lebih besar dari pada 0,05 (Suliyanto,

2011). Uji normalitas dilakukan pada keempat persamaan regresi, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,05244426
Most Extreme Differences	Absolute	0,062
	Positive	0,062
	Negative	-0,052
Kolmogorov-Smirnov Z		0,821
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,511

Pada tabel 2 diperoleh nilai *Asymp Sig (2-tailed)* untuk masing-masing persamaan lebih besar dari *alpha* 0,05 yang berarti distribusi data berada dalam kondisi normal.

3. Uji Multikolonieritas

Tujuan dari dilakukannya uji multikolonieritas adalah untuk mengetahui pada model regresi tersebut terdapat hubungan antar variabel bebas. Model regresi dapat dikatakan baik jika model tersebut tidak memiliki hubungan antar variabel. Berikut Tabel 6 uji multikolonieritas dengan melihat besar dari nilai *tolerance* dan VIF:

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kelonggaran Sumber Daya	0,443	2,257
Komposisi Dewan Komisaris	0,841	1,189
Kepemilikan Manajerial	0,767	1,305
Kepemilikan Asing	0,781	1,281
Komite Audit	0,933	1,072
Ukuran Kantor Akuntan Publik	0,701	1,426
Ukuran Perusahaan	0,423	2,366
Profitabilitas	0,759	1,318
Leverage	0,877	1,140

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai dari *tolerance* menunjukkan variabel-variabel bebas yang diteliti tidak memiliki nilai kurang dari 0,10. hal serupa juga terjadi pada nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* yang menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti tidak memiliki nilai lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini terbebas dari uji multikolonieritas.

4. Uji Autokorelasi

Penggunaan dari uji Autokorelasi sebagai salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji model regresi linear pada penelitian ini memiliki hubungan antar kesalahan

pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, karena pada penelitian dengan data yang memiliki periode tertentu seringkali terjadi autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka pada penelitian ini dilakukan dengan uji *run test*, berikut adalah tabel *run test*:

Tabel 4. Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,00631
Cases < Test Value	87
Cases >= Test Value	88
Total Cases	175
Number of Runs	81
Z	-1,137
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,256

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai dari signifikansi dari uji run test tersebut memberikan hasil penilaian sebesar 0,256 dan lebih dari nilai signifikansi 0,05. Dapat diartikan bahwa penelitian ini terbebas dari uji asumsi klasik autokorelasi.

5. Uji Heterokedastisitas

Penggunaan uji heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dalam model tersebut terjadi ketidakselarasan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dikatakan model regresi tersebut baik jika dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap. Penelitian ini menggunakan metode *Bresch Pagan Godfrey* (BPG) sebagai uji statistisnya. Berikut ini adalah hasil dari uji BPG:

Tabel 5. Uji BPG

Summary	
R	0,328 ^a
R Square	0,108
Adjusted R Square	0,059
Std. Error of the Estimate	1,21198
Sum of Squares	
Regression	29,244
Residual	242,367
Total	271,612

Pada tabel uji BPG dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah 0,108 sedangkan nilai dari *Total Sum Of Square* (TSS) adalah 271,612. Dengan demikian nilai dari *Explained Sum Of Square* (ESS) perkalian dari R^2 dikalikan dengan TSS adalah 29,334096. Kemudian nilai tersebut dihitung melalui rumus X^2 dibagi dua dengan nilai 14,667048. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan X^2 dan $df = 0,05, 9-1$ diperoleh nilai 15,507 atau dapat diartikan X^2 (14,667048) kurang dari X^2 tabel (15,507), maka pada model regresi yang terbentuk disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

6. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi linear berganda mampu memberikan asumsi bahwa setiap variabel dependen terdapat hubungan linear dengan masing-masing prediktornya. Berikut ini Tabel 9 merupakan Hasil pengolahan data regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS:

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

uji t			
variabel	Koefisien regresi	t	Sig.
Kelonggaran Sumber Daya	0,007	2,22	0,028
Komposisi Dewan Komisaris	-0,097	-1,974	0,050
Kepemilikan Manajerial	-0,010	-0,164	0,870
Kepemilikan Asing	0,024	1,392	0,166
Komite Audit	0,002	1,492	0,138
Ukuran Kantor Akuntan Publik	0,003	0,454	0,650
Ukuran Perusahaan	0,005	1,199	0,232
Profitabilitas	0,148	3,636	0,000
Leverage	-0,002	-0,422	0,674
Konstanta	-0,200		
uji koefisien dererminasi			
R Square	0,272		
uji F			
F	6,842		
Sig.	0,000		
Signifikansi < 0,05			

Tabel di atas dapat dijelaskan nilai R square (R^2) sebesar 0,272 hal tersebut menandakan bahwa nilai dari R^2 tersebut antara interval $0 \leq 0,272 \leq 1$, sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel independen pada penelitian ini secara keseluruhan menjelaskan variasi terhadap variabel dependen sebesar 27,2% dan 72,8% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Pada dasarnya uji F merupakan pengujian secara statistik agar dapat mengetahui variabel bebas dari model regresi tersebut memiliki pengaruh secara bersama-sama atau dapat dikatakan sebagai model yang baik. Nilai F_{hitung} pada penelitian ini sebagai berikut:

$$F = \frac{0,272 / (10 - 1)}{1 - 0,272 / (175 - 10)} = 6,84981685$$

Perhitungan di atas merupakan rumus dari nilai F_{hitung} sebesar 6,84981685 dan df: α , $(k-1)$, $(n-k)$ diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 1,94. oleh karena itu dengan nilai F_{hitung} ($6,84981685$) > F_{tabel} (1,94) serta diperkuat juga dengan nilai probabilitas nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan model persamaan regresi pada penelitian ini masuk kriteria *fit* (cocok).

Kelonggaran Sumber Daya Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sumber daya yang ada di perusahaan sangat penting dalam melaksanakan aktifitas perusahaan. Pada penjelasan di atas variabel kelonggaran sumber daya memiliki pengaruh

yang positif terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil tersebut sesuai dengan *Resource-Based Theory* yang menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang secara berkelanjutan. Secara hakikat perusahaan manufaktur telah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk investasi pada bidang sosial karena akan berdampak pada penilaian positif untuk para stakeholder dan perusahaan juga berusaha menjamin secara berkelanjutan melakukan aktifitasnya sesuai peraturan norma yang ada, sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan perusahaan akan menjamin keberlanjutan yang tidak mengesampingkan norma dan peraturan lingkungan masyarakat. Hal tersebut memberikan temuan bahwa perusahaan dengan kelonggaran sumber daya yang semakin tinggi akan memperbaiki kualitas pengungkapan tanggung jawab sosialnya, karena mereka menyakini bahwa dengan informasi tanggung jawab sosial yang berkualitas akan memberikan dampak dalam membangun suatu hubungan yang baik dengan para stakeholder dan sebagai suatu penjamin bahwa sumber daya yang ada pada perusahaan telah dipergunakan dengan baik serta sesuai dengan norma-norma yang ada sehingga para stakeholder tidak lagi memiliki kekhawatiran yang berlebihan akan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk tanggung jawab sosial. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Anggraini dan Djakman, 2017; Arora dan Dharwadkar, 2011) menyatakan bahwa kelonggaran sumber daya berpengaruh secara positif terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Dewan Komisari Independen Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Teori agensi menjelaskan bahwa dewan komisaris dilihat mampu memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi para manajer puncak dan sebagai suatu awal yang baik untuk mengendalikan internal perusahaan (Alfini dan Irwansyah, 2016; Fombrun, 2006; Laksmi dan Kamila, 2018; Panda dan Leepsa, 2017). Pada penjelasan di atas dijelaskan bahwa variabel Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut memberikan temuan bahwa perusahaan manufaktur Indonesia masih belum mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan bernomor 33/POJK 04/2014 mengenai banyaknya anggota dewan komisaris, sehingga menyebabkan dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya. Keberadaan dewan komisaris independen tidak dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab social. Analisis yang terjadi dilapangan masih banyak pula presiden dewan komisaris dan anggota komisaris memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan para manajemen sehingga tidak menjalarkna fungsinya secara baik. Hal tersebut menolak penelitian dari Álvarez dan Zubeltzu (2017) dan Isa dan Muhammad (2014) dan menerima penelitian Siregar dan Priantinah (2017) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan Manajerial Memiliki Pengaruh Negatif Terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Teori agensi menerangkan sinergitas pada kepntingan manajer dan prisipal akan bersamaan jika komposisi saham untuk manajer semakin besar. Penjelasan teori tersebut tidak terbukti karena dari hasil statistik variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut kemungkinan dapat dipengaruhi oleh porposi jumlah saham yang diterima oleh manajer terlalu kecil sehingga

manajer belum mampu memaksimalkan sumber daya yang ada dan memberikan *reward* kepada para manajer juga tidak memberikan jaminan kepada para stakeholder perusahaan untuk memberikan kualitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Menurut Rustiarini, (2011) dan; Terzaghi, (2012) jumlah saham manajerial yang relatif kecil berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial yang berkualitas. Dari data statistik yang diperoleh pada penelitian ini minimal dari kepemilikan manajerial relatif sangat kecil dengan nominal nilai 0,00 dan maksimal nilai kepemilikan manajerial sebesar 0,68. Temuan lain seperti dewan komisaris dengan manajemen memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan sehingga hal tersebut kemungkinan memberikan dampak terhadap kinerja manajemen yang kurang maksimal dalam menyajikan informasi tanggung jawab sosial yang berkualitas. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Laksmi dan Kamila, (2018); Priantana dan Yustian, (2011), A. Khan et al., (2013); Soliman *et al*, (2012) dan sejalan dengan penelitian Rustiarini, (2011) dan; Terzaghi, (2012)

Kepemilikan Asing Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Teori stakeholder mendefinisikan bahwa perusahaan merupakan bagian organisasi menghubungkan kepentingan para pemegang saham internal maupun eksternal (Purba, 2012). kepemilikan asing merupakan Salah satu dari pemegang kepentingan di eksternal perusahaan. Penjelasan di atas variabel kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial. Banyak faktor yang menyebabkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kualitas tanggung jawab sosial salah satunya adalah bahasa dan peraturan yang ada di negara bersangkutan sehingga para pemodal asing tidak mampu memberikan nilai lebih dalam bidang pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Menurut Karima (2014) Kendala geografis dan bahasa salah satu yang penyebab perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki hambatan seperti ketidaktahuan informasi sehingga menyebabkan kualitas dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut menurun. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa perusahaan dengan komposisi kepemilikan asing yang besar maupun kecil bukan sebuah alasan untuk memberikan kualitas baik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Dewi dan Suaryana, (2015); Julia, (2017); Rustiarini, (2011) dan sejalan dengan penelitian Karima (2014); Laksmi dan Kamila (2018).

Komite Audit Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Teori stakeholder menjelaskan bahwa komite audit merupakan bagian internal dari perusahaan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kredibilitasnya dalam menyusun laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan mekanisme sistem tata kelola perusahaan pada (Purba, 2012). Penjelasan di atas variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial. Masih tidak patuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengikuti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan komite audit minimal mengadakan rapat satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam setahun. dilihat dari uji statistik deskriptif dengan nilai minimal 2 menandakan salah satu perusahaan manufaktur Indonesia mengadakan rapat hanya selama satu tahun dua kali rapat. Kemungkinan dari ketidakpatuhan perusahaan untuk melaksanakan memberikan dampak tidak pengaruhnya komite audit terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab social sehingga keputusan-keputusan yang penting untuk pengungkapan tanggung jawab sosialnya tidak berjalan semestinya. Hasil tersebut

tidak sejalan dengan penelitian dari Laksmi dan Kamila, (2018); Suryono dan Prastiwi (2011) dan Tommy et al., (2015) dan sejalan dengan penelitian Putra et al., (2013).

Ukuran Kap Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Menurut perspektif teori keagenan pengawasan perusahaan mempunyai dua tata cara antara lain perusahaan diawasi oleh pihak internal dan perusahaan diawasi oleh pihak eksternal (Bangun et al, 2012). Pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor eksternal (Subramaniam et al, 2009). Penjelasan di atas variabel ukuran kantor akuntan publik tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa kualitas dari pengungkapan tanggung jawab tidak ditentukan oleh afiliasi dari kantor akuntan publik tersebut. Banyak faktor yang mendasari ketidak pengaruhan kantor akuntan publik terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Soliman (2013) kemungkinan yang terjadi dilapangan bahwa semua kantor akuntan publik besar maupun kecil tidak memberikan pelayanan yang baik kepada klien dan dapat pula para klien tidak memberikan informasi secara transparan sehingga pelaporan tanggung jawab sosialnya tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang ada. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Juhmani, (2014); Uwuigbe dan Egbide, (2012); Uyar et al., (2013) dan sejalan dengan penelitian Khasharmeh dan Desoky (2013); Naser dan Hassan (2013); Soliman (2013).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan variabel Kelonggaran sumber daya berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Makna yang dapat ditarik dari hasil tersebut adalah perusahaan Indonesia telah mengerti akan investasi jangka panjang dibidang sosial karena memberikan dampak kepada citra perusahaan yang baik di mata para stakeholder khususnya para konsumen mereka. Variabel Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Makna yang dapat ditarik dari hasil diatas adalah dewan komisaris di Indonesia masih belum mementingkan akuntabilitas dalam memberikan pengawasan yang baik untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial berkualitas sehingga perlu adanya pengetatan regulasi agar para perusahaan di Indonesia mematuhi dan mengerti akan pentingnya tugas dewan komisaris khususnya dewan komisaris independen. Variabel Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Makna yang dapat ditarik dari hasil diatas adalah manajer tidak terpengaruh ada atau tidaknya *reward* bagi mereka untuk memberikan pengungkapan tanggung jawab sosial yang berkualitas. Variabel Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Makna yang dapat ditarik dari hasil diatas adalah kepemilikan asing di perusahaan Indonesia masih terkendala oleh letak geografis, regulasi dan bahasa sehingga pemilik modal asing tidak bias beradaptasi secara cepat. Variabel Komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Makna yang dapat ditarik dari hasil diatas adalah komite audit di perusahaan Indonesia masih belum menerapkan aturan tentang frekuensi rapat yang diadakan, hal ini berdampak tidak berpengaruhnya terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Variabel Ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap alam kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Makna yang dapat ditarik dari hasil diatas adalah kantor akuntan publik di Indonesia masih belum mampu memberikan

pelayanan dan pembelajaran yang baik bagi para kliennya sehingga kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial klien tersebut menjadi tidak berkualitas. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, adapun keterbatasan tersebut adalah peneliti masih kesulitan dalam memberikan penilaian pada variabel dependen karena peneliti memakai GRI tahun 2016 karena peneliti memulai penelitian dari tahun 2013 sehingga berdampak pada hasil penelitian ini. Peneliti masih memiliki kesulitan dalam mengkategorikan kepemilikan saham manajer karena masih sangat sedikit perusahaan-perusahaan di Indonesia memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Peneliti masih memiliki keterbatasan mendapatkan informasi laporan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan baik di laporan tahunan maupun *website* perusahaan tersebut. Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian, maka saran penelitian selanjutnya adalah penggunaan GRI G4 sebagai indikator pengungkapan bukanlah suatu kewajiban entitas yang pada akhirnya membuka peluang peneliti untuk menyusun indikator-indikator pengungkapan tanggung jawab sosial yang beragam dan konsekuensi dari keberagaman tersebut dapat mempengaruhi konsistensi hasil penelitian. Penelitian mendatang diharapkan menambahkan variabel nilai perusahaan sebagai variabel dependennya dan variabel pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai variabel mediasi. Penelitian mendatang dapat dilakukan dengan cara memediasi atau memoderasi dengan variabel-variabel yang mendukung

Daftar Pustaka

- Alfini Maryanti Liu, Irwansyah, Z. F. (2016). Peran Agency Cost Reduction Dalam Memediasi Hubungan Antara Corporate Social Responsibility Dengan Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 141–156.
- Álvarez, I., & Zubeltzu, E. (2017). Firms' Board Independence and Corporate Social Performance: A Meta-Analysis. *Sustainability*, 9(6), 1006.
- Anggraini, D. Y., & Djakman, C. D. (2017). Slack resources , feminisme dewan, dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 94–118.
- Anita, Jurnal, T., & Meiliana. (2017). Pengungkapan Corporate Social Responsibility : Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember 2017*, 1–30.
- Arora, P., & Dharwadkar, R. (2011). Corporate governance and corporate social responsibility (CSR): The moderating roles of attainment discrepancy and organization slack. *Corporate Governance: An International Review*, 19(2), 136–152.
- Bangun, N., Octavia, J., & Tarigan, K. B. (2012). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 717–738.
- Bourgeois, L. J. (1981). On the Measurement of Organizational Slack1. *The Academy of Management Review*, 6(1), 29–39.
- Cahyaningsih, & Martina, V. Y. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial. *Jurnal Siasat Bisnis*, 15(2), 171–186.
- Chintrakarn, P., Jiraporn, P., Kim, J.-C., & Kim, Y. S. (2016). The Effect of Corporate Governance on Corporate Social Responsibility. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 45(1), 102–123.
- Dewi, N. P. M. S., & Suaryana, I. G. N. A. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan

- Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 84–98.
- Fatima, A. H., Abdullah, N., & Sulaiman, M. (2015). Environmental disclosure quality: examining the impact of the stock exchange of Malaysia's listing requirements. *Social Responsibility Journal*, 11(4), 904–922.
- Fombrun, C. J. (2006). Corporate Governance. *Corporate Reputation Review*, 8(4), 267–271.
- Gray, R., Javad, M., Power, D. M., & Sinclair, C. D. (2001). Social and environmental disclosure and corporate characteristics: A research note and extension. *Journal of Business Finance and Accounting*, 28(3–4), 327–356.
- Harrison, J. S., & Coombs, J. E. (2012). The Moderating Effects from Corporate Governance Characteristics on the Relationship Between Available Slack and Community-Based Firm Performance. *Journal of Business Ethics*, 107(4), 409–422.
- Isa, M. A., & Muhammad, S. (2014). The Impact of Board Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Nigerian Food Product Firms. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 1(12), 34–45.
- Juhmani, O. (2014). Determinants of Corporate Social and Environmental Disclosure on Websites: the Case of Bahrain. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 2(4), 77–87.
- Julia, J. (2017). pengaruh Struktur Kepemilikan, Pelanggan Dan Slack Organisasi Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perbankan Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013–2015). *Accountthink*, 2(02), 349–361.
- Karima, N. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Widya Warta*, (2), 219–230.
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 207–223.
- Khasharmeh, H. A., & Desoky, A. M. (2013). On-line Corporate Social Responsibility Disclosures : The Case of the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries. *Global Review of Accounting and Finance*, 4(2), 39–64.
- Laksmi, A. C., & Kamila, Z. (2018). The Effect of Good Corporate Governance and Earnings Management to Corporate Social Responsibility Disclosure. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1), 1–16.
- Naser, K., & Hassan, Y. (2013). Determinants of corporate social responsibility reporting: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Issues in Business Research*, 2(3), 56–74.
- Nielsen N.V. (2014). *Doing Well By Doing Good*. (June), 1–17.
- Nurhandika, A., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Dampaknya Pada Nilai Perusahaan. *Sosio E-Kons*, 11(3), 249–258.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
- Priantana, R. D., & Yustian, A. (2011). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 4(1), 65–78.
- Purba, M. P. (2012). *Profesi Akuntan Publik Di Indonesia (Pertama)*. Yogyakarta:

GRAHA ILMU.

- Putra, R. D., Yunilma, & Minovia, A. F. (2013). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dan Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Corporate Environmental Disclosure. *E-Jurnal Universitas Bung Hatta*.
- Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory. *Accounting, Organizations and Society*, 17(6), 595–612.
- Rustiarini, N. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–24.
- Soliman, M. M. (2013). Firm Characteristics and the Extent of Voluntary Disclosure: The Case of Egypt. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(17), 71–80.
- Soliman, M. M., El Din, M. B., & Sakr, A. (2012). Ownership Structure and Corporate Social Responsibility (Csr): an Empirical Study of the Listed Companies in Egypt. *The International Journal of Social Sciences*, 5(1), 63–74.
- Suastha, R. D. (2016). Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah.
- Subramaniam, N., Mcmanus, L., & Zhang, J. (2009). Corporate governance, firm characteristics and risk management committee formation in Australian companies. *Managerial Auditing Journal*, 24(4), 316–339.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Supriyono, E., & Suhardjanto, D. (2013). Praktik pengungkapan sosial: studi komparatif di asia tenggara. *Siasat Bisnis*, 17(2), 187–207.
- Suryono, H., & Prastiwi, A. (2011). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (SR): Studi pada Perusahaan-Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2009. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 21–22.
- Terzaghi, M. T. (2012). Pengaruh Earning Management Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap. *Jurnal Ekonmi Dan Informasi Akuntansi*, 2(1), 01–14.
- Tommy, Y. V., Utary, A. R., & Oktavianti, B. (2015). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi*, (c), 427–436.
- Utama, S. (2007). Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Pidato Ilmiah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, (November).
- Uwuigbe, U., & Egbide, B.-C. (2012). Corporate Social Responsibility Disclosures in Nigeria: A Study of Listed Financial and Non-Financial Firms. *Journal of Management and Sustainability*, 2(1), 160–169.
- Uyar, A., Kilic, M., & Bayyurt, N. (2013). Association between firm characteristics and corporate voluntary disclosure: Evidence from Turkish listed companies. *Intangible Capital*, 9(4), 1080–1112.